



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : YUDIKATIF  
**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG  
**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 53457

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 878.000.000

1. Tanah Seluas 1073 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 160.950.000
2. Tanah Seluas 251 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 37.650.000
3. Tanah Seluas 1245 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 186.750.000
4. Tanah Seluas 1716 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 85.800.000
5. Tanah Seluas 859 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 42.950.000
6. Tanah Seluas 2278 m2 di KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 113.900.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 47 m2/47 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 108.650.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.900.000
2. MOTOR, HONDA BEAT POP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.750.000
3. MOBIL, DAIHATSU AYLA 1.0 X AT / MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	138.552.070
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.125.202.070
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.125.202.070

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.